



Analisis Sikap yang Diambil oleh Pemerintah Korea Selatan pada Masa Presiden Park Geun Hye Terkait dengan Isu *Comfort*

Galuh Kinnari Lalitya

Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Countries in East Asia have fluctuating relationships. Various issues cause conflict between these countries and their allies such as the United States. One of the issue that remain become a problem is historical issue related to comfort women. This problem involves South Korea and Japan as the main actors. Often there are tensions between the two countries because of this issue. The comfort women issue has also caused several agreements to fail. South Korean victims, government, and activists continue to seek official recognition and requests from the Japanese government. Park Geun Hye, has actively criticized and pressured the Japanese Government just as the previous presidents had done. However, Park changed his attitude by agreeing to the "final and irreversible" 2015 Agreement on the issue of comfort women. This raises pros and cons among both the government and the people of South Korea itself. The purpose of this study was to determine what influenced Park's changes in attitude and policy. To analyze the effect of the policies taken, this study uses an international systems approach and offensive realism theory.

Keywords: *South Korea-Japan, comfort women, international system, balancing, and alliance*

PENDAHULUAN

Kondisi perpolitikan di wilayah Asia Timur dapat dikatakan fluktuatif. Negara-negara di Asia Timur saling menjalin kerja sama tetapi tak jarang ketegangan juga terjadi diantara mereka. Konflik yang ada umumnya berkaitan dengan militer, sengketa wilayah, dan juga permasalahan sejarah masa lalu terkait dengan masa perang. Hal ini pula yang terjadi dengan Korea Selatan dan Jepang. Meskipun Perang Dunia II telah berakhir permasalahan *comfort women* masih menjadi permasalahan terutama setelah para mantan *comfort women* dari Korea Selatan menuntut permintaan maaf dari pemerintah Jepang. *Comfort women* adalah budak seks tentara – tentara Jepang selama Perang Dunia ke 2 berlangsung (awf.or.jp). Pemerintah dan masyarakat Korea Selatan tidak hanya menginginkan pengakuan dan permintaan maaf dari Jepang tetapi juga pemberian hukuman yang tegas pada orang – orang yang bertanggung jawab dalam praktik *comfort women* tersebut. Salah satu Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye secara aktif terus mengkritik Pemerintah Jepang terkait permasalahan sejarah. Pada bulan Mei tahun yang sama, ia menyampaikan pidato kepada Kongres AS, "*Sudah mengatakan bahwa mereka yang buta terhadap masa lalu tidak bisa melihat masa depan*". Bahkan pada tahun 2014 Park Geun Hye memperingatkan Jepang jika negaranya akan

menghadapi isolasi jika merevisi permintaan maaf PM Kono pada tahun 1995. Kemudian pada 2015 ia juga terus mendesak untuk menyelesaikan masalah *comfort women*, dengan mengatakan ini adalah "waktu yang tepat untuk mengambil keputusan."

Namun, sikap Park mulai berubah sejak tahun 2014. Saat Park Geun Hye bertemu untuk pertama kalinya dengan Shinzo Abe pada KTT Nuklir 2014, Park sepakat untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan sejarah yang ada antara Korea Selatan dan Jepang. Hingga pada 2015 akhirnya Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe dan Presiden Korea, Park Geun Hye mengadakan dialog mengenai permasalahan *comfort women*. Dialog ini membuahkan kesepakatan antara kedua negara yang dianggap sebagai kesepakatan yang '*Final and Irreversible*' terkait dengan permasalahan *comfort women*. Isi dari kesepakatan tersebut diantaranya adalah Jepang meminta maaf dan akan memberikan biaya ganti rugi sebesar 1 Miliar Yen dan Pemerintah Korea diminta untuk menghilangkan *statue of peace* yang berada di depan kantor kedutaan besar Jepang (BBC.com, 2015). Dilihat dari sejarah dan perkembangan permasalahan ini hanya pada masa pemerintahan Park Geun Hye, kedua negara duduk bersama untuk secara khusus membahas mengenai penyelesaian isu *comfort women*. Pertemuan tersebut dilakukan setelah Park beberapa kali menolak untuk bertemu dengan Abe. Park tetap melakukan dialog dan kesepakatan dengan Abe meskipun para mantan *comfort women* dan kelompok pendukung fundamentalis menentang perjanjian tersebut. Lee, seorang mantan *comfort women* menyatakan jika perjanjian itu tidak mencerminkan pandangan mantan *comfort women*. Sebuah kelompok sipil, the Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery in Japan menyebut bahwa tindakan tersebut adalah diplomasi yang memalukan dan sepenuhnya mengkhianati *comfort women* dan rakyat Korea Selatan (Choe S. , 2015).

Sikap Park Geun Hye tersebut berbeda dengan sikap pada awal masa kepemimpinannya. Pilihan tersebut juga berbeda dari presiden – presiden Korea Selatan sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui alasan perubahan Korea Selatan dan menjelaskan pengaruh sistem internasional terhadap kebijakan luar negeri Korea Selatan. Perubahan kebijakan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya adalah sistem internasional. Sistem internasional inilah yang kemudian membentuk perilaku negara. Struktur sistem itu dan perubahan-perubahan yang dialaminya selama ini telah menentukan perilaku aktor-aktor hubungan internasional yang terlibat di dalamnya (Mas'ud, 1990). Realisme ofensif mengasumsikan bahwa sistem internasional sangat membentuk perilaku negara. asumsi realis menyebutkan jika sistem internasional bersifat anarkis dan pada akhirnya menimbulkan ancaman-ancaman bagi negara karena adanya kekuatan besar dan rasa curiga. Ancaman inilah yang dapat mengubah kebijakan negara. Mearsheimer (2014) menyebutkan jika negara dapat melakukan pelbagai strategi untuk mengurangi ancaman dari negara lain. Salah satu strategi ini adalah *balancing* dengan aliansi sebagai langkah untuk mencapainya. Dengan aliansi Biaya atau beban yang digunakan untuk mengendalikan agresor lebih sedikit dan meningkatkan jumlah daya tembak untuk berhadapan dengan agresor.

PEMBAHASAN

Sistem *comfort women* muncul setelah terjadi peristiwa *Rape of Nanking* atau *Shanghai Incident* dimana para tentara Jepang memperkosa ratusan perempuan Tiongkok (Kuki, 2013). Untuk memperbaiki reputasi Jepang akibat insiden ini dan mencegah tentara-tentara memperkosa perempuan lokal serta terkena VD (*venereal disease*), pemerintah Jepang mendirikan *comfort station* dan memulai praktik *comfort women*. Diperkirakan ada sebanyak 200.000 perempuan Korea yang menjadi korban (United Nation Commission On Human Rights, 1996). Pengadilan Global PBB tentang Pelanggaran Hak Asasi Perempuan pada Konferensi Dunia PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1993 memperkirakan kurang dari 10 persen *comfort women* selamat di akhir Perang Dunia (Levy & Sidel, 2000). Korea

Selatan terus berusaha menyuarakan protesnya dan menekan Jepang untuk bertanggung jawab. Dimulai sejak awal tahun 1992 para aktivis dan mantan *comfort women* mengadakan *Wednesday Demonstration*. Demonstrasi ini selalu diadakan setiap hari Rabu sampai dengan saat ini di depan kantor Kedutaan Besar Jepang. Para aktifis juga membangun sebuah patung *Pyeonghwai sonyeosang* yang menggambarkan seorang *comfort women*. *Pyeonghwai sonyeosang* atau *Statue of Peace* berbentuk seorang anak perempuan yang menghadap ke arah Kantor Kedutaan Besar Jepang menggunakan *hanbok*¹ dan duduk di sebuah kursi dengan tangan mengepal dan seekor burung berada di pundaknya. Patung itu pertama kali dibangun dan diresmikan pada acara demonstrasi mingguan ke-1.000 di depan Kedutaan Besar Jepang pada tahun 2011. Adanya demonstrasi dan terutama pembangunan patung menimbulkan ketegangan diantara kedua negara.

Pemerintah Jepang awalnya menyangkal dan menolak untuk meminta maaf karena menganggap semua permasalahan perang serta kompensasi telah diselesaikan pada San Francisco Peace Treaty pada 1951 dan Perjanjian Damai Korea Selatan – Jepang tahun 1965 (Soh, 2001). Sejak 1991 akhirnya Pemerintah Jepang mulai mengutarakan permintaan maaf, namun sering kali ditolak dan tidak dianggap sebagai permintaan resmi oleh Korea Selatan. Terkait dengan keterlibatannya Pemerintah tetap menyatakan jika rumah bordil atau *comfort station* yang ada tidak dijalankan oleh pihak pemerintah ataupun militer tetapi oleh pihak swasta. Pada 1993 Ketua Sekretaris Kabinet Yohei Kono menyatakan permintaan maaf yang terkenal dengan sebutan “*Kono Statement*”. Kono mengatakan jika Jepang mengakui keberadaan *comfort women* pada Perang Dunia II dan mengakui jika militer Jepang terlibat dalam praktik tersebut. Pemerintah Korea Selatan sangat menyambut baik permintaan maaf ini karena akhirnya mereka mengakui keterlibatan militer dan adanya pemaksaan dan kekerasan. Akan tetapi pernyataan ini tetap menuai kritik karena Korea Selatan merasa Jepang tetap belum menjalankan tugasnya sebagai pelaku yang harus memberikan kompensasi dan mendapatkan hukuman. Jepang juga telah mendirikan *The Asian’s Women Fund* atau AWF sebuah lembaga non-pemerintah yang bertujuan membagikan dan memberikan secara merata kompensasi bagi korban *comfort women*. Lembaga ini memberikan setidaknya dua juta yen untuk setiap korban yang melapor dan terdaftar (awf.or.jp). Lembaga tersebut banyak dikritik oleh media dan juga masyarakat karena dana yang diberikan lebih banyak berasal dari perusahaan swasta ataupun organisasi yang ingin membantu dan bukannya pemerintah.

Saat Shinzo Abe menjabat terdapat wacana untuk merevisi “*Kono Statement*” karena dianggap tidak valid. Hal ini tentu saja menimbulkan kecaman tidak hanya dari Korea Selatan tetapi juga negara Asia lainnya. Akibat dari sikap Abe yang ingin merevisi “*Kono Statement*”, Presiden Korea Selatan, Pak Geun Hye menolak untuk bertemu dengan PM Abe. Selama delapan bulan setelah menjabat sebagai presiden, Park Geun Hye belum bertemu dengan Shinzo Abe. Hubungan kedua negara pada masa ini dapat dikatakan kritis. Setelah bertahun-tahun tidak terselesaikan dan hanya memberikan permintaan maaf dan pernyataan, akhirnya Shinzo Abe dan Presiden Korea Selatan Park Geun Hye bertemu secara resmi melalui panggilan telepon selama kurang lebih 15 menit untuk membicarakan tentang penyelesaian permasalahan *comfort women*. Dialog yang terjadi pada 2015 ini diharapkan menjadi akhir dari permasalahan dan tidak lagi dapat diubah jika sudah ditandatangani. Untuk itu kesepakatan ini disebut dengan *Finally and Irreversibly Agreement*. Kesepakatan ini ditandatangani pada 28 Desember 2015 dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan Jepang.

Keputusan Korea Selatan terkait dengan isu *comfort women* pada masa Park Geun Hye yang akhirnya menyetujui penyelesaian dengan Pemerintah Jepang merupakan

¹ Hanbok adalah pakaian tradisional Korea Selatan

keputusan yang kontroversial dan berbeda dari kepemimpinan presiden-presiden terdahulu. Perubahan sikap ini diakibatkan oleh adanya ancaman eksternal dan juga tekanan dari pihak eksternal yang berperan penting dalam regional Asia Timur. Terdapat dua negara yang saat ini menimbulkan masalah dan menjadi ancaman utama bagi Korea Selatan yaitu Korea Utara dan Tiongkok. Secara inheren kekuatan besar memiliki kemampuan militer ofensif yang dapat digunakan untuk menyerang satu sama lain. Hal inilah yang terjadi dengan Korea Selatan dimana kedua negara tersebut melakukan tindakan agresif dengan kemampuan militer yang dimiliki. Korea Utara telah sejak lama menjadi musuh bersama untuk aliansi Jepang-Korea Selatan-Amerika Serikat. Beberapa kali Korea Utara menggunakan militernya untuk melakukan tindakan ofensif. Seperti pada saat Korea Utara menenggelamkan Kapal Perang Cheonan dengan torpedonya. Akibatnya, 46 tentara Korea Selatan tewas dimana beberapa diantaranya tidak dapat ditemukan. Melakukan serangan ke kapal perang negara lain tanpa alasan yang jelas merupakan tindakan agresi yang cukup besar. Pada 2015, Korea Utara menyatakan tidak akan meminta maaf meski mendapatkan sanksi ekonomi dan mengancam akan kembali melakukan serangan. Pada tahun yang sama juga terjadi konflik bersenjata paling buruk setelah berakhirnya Perang Korea. Korea Utara menembakkan puluhan peluru artileri ke Pulau Yanpyeong yang terletak sekitar 3 km (1,8 mil) selatan dari perbatasan laut antar-Korea yang disengketakan (Marcus, 2010). Serangan ini mengakibatkan tiga warga sipil terluka, enam belas tentara Korea Selatan terluka, dua tentara tewas, dan puluhan rumah rusak. Peristiwa tenggelamnya Kapal Cheonan dan penembakan Yeonpyeong telah membuktikan asumsi bahwa negara yang memiliki kekuatan ofensif dapat menyerang negara lainnya. Tindakan agresif Korea Utara ini tentu membahayakan keamanan Korea Selatan. Penyerangan ini secara jelas menimbulkan korban jiwa.

Setelah Kim Jong Un menjabat sebagai presiden ancaman semakin meningkat. Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara menjadi lebih aktif dan agresif. Bahkan setelah Park Geun Hye menjabat sebagai Presiden provokasi dari Korea Utara terus meningkat (Moon & Boo, 2015). Dua bulan sebelum pelantikan Park yaitu pada 12 Desember 2012, Korea Utara meluncurkan roketnya ke orbit. Kemudian pada 12 Februari 2013 Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir bawah tanah ketiganya. Peristiwa ini merupakan bentuk perubahan rezim nuklir Korea Utara. Korea Utara dibawah Kim Jong Un ingin menunjukkan bahwa program nuklirnya tidak akan pernah dihentikan. Korea Utara mengatakan bahwa Korea Selatan akan bertemu dengan "penghancuran akhir," setelah uji coba nuklir ketiga ini. Pada uji coba kali ini kekuatannya lebih besar yaitu 5,0 dalam besaran seismik yang mana lebih besar dari kali lebih besar dari uji coba sebelumnya (CTBTO.org, 2015). Korea Utara juga terus melakukan uji coba misil. Sepanjang 2015 terhitung sudah enam kali Korea Utara meluncurkan misilnya. Jumlah peluncuran misil Korea Utara terus meningkat dan bertambah lebih dari dua kali lipat dari masa kepemimpinan Kim Jong-il. Sekali lagi Korea Utara tidak segan melakukan tindakan ofensif dengan menanamkan ranjau darat yang akhirnya meledak di zona demiliterisasi (DMZ). Setelah peristiwa ini Korea Selatan memerintahkan operasi propaganda perbatasan terhadap Korea Utara kembali diterapkan untuk pertama kalinya dalam 11 tahun (Lim, 2015).

Sedangkan Tiongkok membuat Korea Selatan selalu curiga dengan perkembangan dan semakin meningkatnya kekuatan militer dan ekonominya. Menurut realis negara memang tidak bisa memastikan niat negara lain. Akan selalu timbul kecurigaan antar kekuatan besar. Dalam konflik Cheonan dan Yeonpyeong, Tiongkok lebih memilih berada di pihak Korea Utara meskipun tindakannya telah menimbulkan korban jiwa. Ada juga kekhawatiran bahwa dalam proses membela Korea Utara, Tiongkok telah memberikan izin kepada Pyongyang untuk melakukan provokasi yang bahkan lebih serius di masa depan (Snyder & Byun, 2011). Tidak hanya izin memprovokasi yang dapat diberikan oleh Tiongkok tetapi juga bantuan secara militer. Keadaan semacam ini sudah pernah terjadi pada tahun 1950 saat Tiongkok

menurunkan tentaranya dalam pertempuran antara Korea Utara dan Selatan. Rudal balistik Tiongkok juga semakin berkembang. Telah terdapat rudal yang dapat mencapai wilayah Korea Selatan. Fungsi utama penyebaran rudal Tiongkok adalah pertahanan dan pencegahan terhadap serangan AS (Ahn, Choi, & Kweon, 2015). Namun, rudal balistik milik Tiongkok tetap merupakan ancaman strategis bagi Korea Selatan. Tidak ada yang tau apakah negara tidak akan menggunakan militernya untuk menyerang negara lain. Meskipun tujuannya untuk perbatasan tetap saja dapat menimbulkan kecurigaan dan mengancam bagi negara lain.

Kecurigaan dan rasa terancam juga muncul akibat dari penetapan . Air Defense Identification Zone (ADIZ) Tiongkok di Laut Cina Timur. ADIZ milik Tiongkok ini wilayahnya memotong wilayah Korea Selatan yang mencakup Ieodo (Korea Selatan)/Socotra Rock (Tiongkok). Sudah jelas jika Tiongkok dengan sengaja mengklaim wilayah ADIZ di atas wilayah yang disengketakan dengan negara lain. Pesawat yang terbang di zona ini harus melaporkan rencana penerbangan, menggunakan komunikasi radio, dan menjaga transponder tetap menyala. Angkatan Bersenjata Tiongkok menyatakan akan melakukan tindakan defensif pada pesawat yang melanggar ADIZ. Tindakan defensif ini dapat berupa menembak jatuh pesawat. Sebelum pengumuman mengenai ADIZ, Mengingat fakta dimana Tiongkok tidak segan menggunakan militernya untuk menyerang negara yang bersengketa dengannya, Korea Selatan perlu mewaspadai Tiongkok terkait dengan masalah ADIZ ini. Tiongkok yang memiliki kekuatan lebih besar dari Korea Selatan dan negara lain di sekitarnya berada dalam posisi yang menguntungkan untuk menggunakan ancaman militer untuk memaksa pihak lain menerima kesepakatan yang diberikan.

Ancaman ekonomi dari Tiongkok juga harus dihadapi oleh Korea Selatan. Rencana penempatan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) di Korea Selatan menimbulkan penolakan dari Tiongkok. Tiongkok sudah mulai menyatakan ancamannya jika Korea Selatan menyetujui pemasangan THAAD oleh Amerika Serikat. Xinhua News Agency yang dikelola pemerintah Tiongkok mengancam, "Korea Selatan akan mengorbankan hubungannya yang berkembang cepat dengan Tiongkok jika masuk ke dalam jaringan pertahanan rudal dan mengabaikan protes dari kekuatan ekonomi terbesar di Asia (Kim O. H., 2014)". Tiongkok mengkritik dengan mengatakan bahwa Korea Selatan secara ekonomi menghasilkan uang dari Tiongkok dan kemudian menggunakan uang itu untuk menargetkannya secara militer. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar Korea Selatan akibatnya terdapat ketergantungan ekonomi dengan Tiongkok. Korea Selatan tidak bisa memastikan apakah Tiongkok tidak akan menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan Korea Selatan. Asumsi ini wajar karena Tiongkok pernah memboikot Jepang karena isu sengketa wilayah. Kebangkitan Tiongkok dan semakin menguatnya pengaruh ekonomi Tiongkok akan mengancam Korea Selatan. Akan sangat berbahaya apabila Tiongkok benar-benar menyerang ekonomi Korea Selatan yang bergantung padanya.

Negara yang memiliki kekuatan nuklir lebih mengancam daripada negara yang tidak memiliki nuklir. Sebagai negara yang secara geografis dekat dengan Korea Utara dan Tiongkok, ancaman-ancaman ini sangat berbahaya bagi keamanan negara. Kekuatan besar yang dipisahkan oleh perairan besar biasanya tidak memiliki banyak kemampuan ofensif satu sama lain. Korea Selatan dan Korea Utara tidak dipisahkan oleh perairan. Sedangkan perairan yang memisahkan Korea Selatan dan Tiongkok tidaklah besar dan justru menjadi wilayah konflik. Maka wajar bagi Korea Selatan memiliki intensitas ketakutan yang lebih besar terhadap kedua negara tersebut. Oleh karena itu, Korea Selatan perlu bertindak untuk melindungi keamanan negaranya. Pada akhirnya Korea Selatan membutuhkan bantuan negara lain untuk membantu menjaga negara dan stabilitas regionalnya.

Permasalahan *comfort women* tidak hanya mempengaruhi hubungan antara Korea Selatan dan Jepang tetapi juga dengan sekutu mereka yaitu Amerika Serikat. Sebagai sekutu kedua negara, Amerika Serikat juga berperan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pesan Obama

terkait hubungan kedua negara pun cukup jelas “*shake it off and move forward*” (Kim M. , 2016). Amerika Serikat kecewa dengan sikap Korea Selatan yang mengabaikan perjanjian sebelumnya yang dianggap menyelesaikan isu ini. Tindakan Amerika Serikat yang cukup signifikan dalam perbaikan hubungan Korea Selatan-Jepang adalah saat Amerika Serikat mengadakan pertemuan trilateral di sela-sela KTT Keamanan Nuklir 2014. Ini adalah pertama kalinya Shinzo Abe dan President Park bertemu pada saat hubungan antara Korea Selatan dan Jepang tegang oleh warisan masa lalu kekaisaran Jepang (Lee E. Y., 2015). Sangat jelas terlihat jika Amerika Serikat benar-benar berusaha untuk ikut menyelesaikan permasalahan *comfort women* demi dapat memperkuat aliansinya di wilayah Asia Timur.

Keberhasilan kesepakatan dan membaiknya hubungan dua sekutunya akan sejalan dengan strategi Amerika Serikat “*Pivot to Asia*”. Tujuan dari strategi ini adalah membendung kebangkitan Tiongkok dan perlindungan diri dari nuklir Korea Utara. Tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah memperkuat aliansi keamanan, memperluas perdagangan dan investasi, serta membangun kehadiran militer yang berbasis luas (Clinton, 2011). Bagi Amerika Serikat Korea Selatan yang saat ini menjadi kekuatan regional tingkat menengah yang dapat mempengaruhi kebijakan AS di Asia Timur Laut, khususnya pendekatan Amerika Serikat terhadap Korea Utara (Manyin, 2017). Amerika Serikat-Korea Selatan memiliki latihan militer “*Key Resolve*” dan “*Foal Eagle*” yang selalu diadakan setiap tahunnya di Korea Selatan. Amerika Serikat juga melakukan berbagai latihan militer dengan Jepang untuk membendung Tiongkok yang semakin kuat di wilayah Laut Cina Selatan. Latihan militer yang dijalankan juga bertujuan untuk memperkuat strategi Amerika “*pivot to Asia*”. Militer ketiga negara pernah bertemu pada saat latihan militer *Keen Sword 2011*. *Keen Sword* merupakan latihan militer antara AS-Jepang. Amerika Serikat telah memiliki kegiatan latihan militer bersama dengan Jepang dan Korea Selatan. Namun, sampai 2015 belum terdapat aliansi trilateral diantara ketiga negara. Untuk itulah penting bagi Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dan Jepang agar kerjasama baik militer maupun ekonomi dapat diperkuat.

Ancaman-ancaman yang dihadapi Korea Selatan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengubah sikap Park Geun Hye karena intensitas rasa terancam dan kecurigaan yang semakin meningkat. Berbagai ancaman yang diberikan Korea Utara membuat Park yang awalnya bersikap lembut berubah menjadi keras. Selama kunjungan resminya di AS pada Mei 2013, Park menegaskan bahwa kelangsungan hidup Korea Utara dipertaruhkan seandainya ia terus memainkan kartu nuklir (White House.org, 2013). Korea Selatan sangat mengecam serangan ini dan menyatakan bahwa Korea Utara akan membayar “harga yang keras” akibat tindakan ofensif ini. Ancaman ekonomi dari Tiongkok juga membutuhkan solusi secepatnya dari pemerintahan Park untuk menjaga kestabilan. Kebijakan luar negeri Park akhirnya berubah dengan menekankan pada pentingnya pencegahan terhadap serangan dan salah satunya adalah melalui aliansi strategis dengan Amerika Serikat dan juga Jepang (Moon & Boo, 2015). Aliansi ini dilakukan demi menerapkan strategi *balancing* untuk menghadapi Korea Utara dan Tiongkok. Perbaikan hubungan dengan Jepang merupakan langkah awal untuk memperkuat aliansi. Termasuk dengan mempertimbangkan tekanan dari Amerika Serikat karena Amerika memiliki peran penting di kawasan Asia Timur terutama dengan adanya berbagai ancaman yang dihadapi. Kepentingan keamanan Korea Selatan dan Jepang terus terkait erat dengan Amerika Serikat, seperti yang telah terjadi sejak Perang Korea (Snyder S. A., 2016).

Akhirnya pada pertemuan trilateral di KTT Keamanan Nuklir 2014, Presiden Park bersedia bertemu dengan PM Abe namun dengan syarat bahwa Abe dengan jelas menyatakan niatnya untuk mempertahankan pernyataan tahun 1993. Presiden Park Geun Hye memilih untuk memperbarui arah kebijakan luar negerinya. Ia menekankan kebijakannya pada aliansi dengan Amerika, memprakarsai kerja sama, serta perdamaian kawasan Asia Timur. Bagi

Park, meningkatkan hubungan bilateral dengan Amerika dan ke aliansi strategis yang komprehensif berfungsi sebagai kunci dari upaya *counter-balancing* AS di kawasan Asia-Pasifik dan memperkuat kerja sama pertahanan rudal. Setelah kesepakatan terjadi Park mempercayai jika ini merupakan awal bagi menguatnya aliansi antara Korea Selatan-Jepang. Setelah Kesepakatan 2015 disetujui Korea Selatan memulai kembali perundingan terkait kerja sama yang sebelumnya tertunda atau gagal akibat dari menegangnya hubungan kedua negara. Kesepakatan kerja sama harus segera dibuat untuk tindakan preventif terhadap ancaman Tiongkok dan Korea Utara. Pada November 2016 Korea Selatan-Jepang setuju untuk berbagi informasi intelijen terkait dengan senjata pemusnah massal yang digunakan oleh Korea Utara selama krisis melalui kesepakatan GSOMIA. Untuk pertama kalinya aliansi Amerika-Korea Selatan-Jepang mengadakan latihan peluncuran rudal trilateral. Latihan ini sangat penting karena menunjukkan komitmen untuk bekerja bersama untuk mengatasi masalah keamanan yang nyata di wilayah tersebut dan secara jujur menghadapi masalah kerja sama keamanan keras yang sensitif dan kontroversial (Snyder S. A., 2016). Tidak hanya dalam bidang keamanan dan militer, membaiknya hubungan dua sekutu Amerika ini juga berpengaruh pada kesepakatan ekonomi. Pada 28 Agustus 2016, Korea Selatan dan Jepang berhasil memperbarui kesepakatan bilateral pertukaran mata uang. Tahun lalu kesepakatan ini berakhir dan tidak dapat dirundingkan kembali karena meningkatnya ketegangan akibat permasalahan sejarah. Menteri Keuangan Korea, Yoo Il-ho, mengatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dan ketidakseimbangan keuntungan yang didapatkan (Nam, 2016).

Meskipun sistem internasional anarki dan negara dipenuhi kecurigaan, logika *balance of power* seringkali menyebabkan kekuatan besar untuk membentuk aliansi dan bekerja sama untuk melawan musuh bersama. Mearsheimer (2014) menyebutkan bahwa negara tetap dapat melakukan kerja sama jika negara hanya memikirkan *absolute gain*. Keputusan Korea Selatan untuk menyetujui Kesepakatan 2015 membuahkan kesepakatan keamanan dan ekonomi dengan sekutunya yang memberikan keuntungan bagi Korea Selatan. Keuntungan yang didapat adalah dapat meningkatkan kekuatan dan pertahanannya dengan berbagai fasilitas yang didapat melalui aliansi baik trilateral maupun bilateral dengan Jepang serta Amerika Serikat. Pada dasarnya kerja sama menurut realis yaitu keadaan dimana negara memiliki dorongan untuk memanfaatkan negara lain. Dalam hal ini Korea Selatan memanfaatkan Jepang dan Amerika untuk meningkatkan kapabilitas militer, mempertahankan diri dari Korea Utara dan Tiongkok serta menstabilkan kawasan Asia Timur.

KESIMPULAN

Keputusan Korea Selatan untuk menyetujui Kesepakatan 2015 "*final and irreversible*" mengenai *comfort women* dipengaruhi oleh keadaan dalam sistem internasional. Perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem internasional dapat menentukan perilaku aktor-aktor yang berada di dalamnya. Keadaan dalam sistem internasional yang mempengaruhi sikap Korea Selatan adalah adanya ancaman dari kekuatan lainnya yaitu Korea Utara dan Tiongkok serta adanya tekanan dari sekutu terdekatnya yaitu Amerika Serikat. Struktur sistem internasional memaksa negara-negara yang hanya berusaha untuk merasa aman untuk bertindak agresif dan merasa takut satu sama lain. Penyebab rasa takut ini diantaranya adalah adanya fakta dimana bahwa negara selalu memiliki beberapa kemampuan militer ofensif dan suatu negara tidak pernah bisa percaya dengan niat negara lainnya. Ancaman dari Tiongkok dan Korea Utara pada akhirnya membuat Korea Selatan memilih untuk melakukan *balancing*. Langkah *balancing* yang dipilih adalah dengan memperkuat aliansi yang ada. Itu sebabnya Korea Selatan menyetujui Kesepakatan 2015 agar dapat memperbaiki hubungannya dengan Jepang dan memperkuat aliansi.

REFERENSI

- Ahn, S. K., Choi, K., & Kweon, Y. E. (2015). Implications of China's Ballistic Missiles for Korean National Security. *Asan Institute for Policy Studies*, 1-22.
- Argibay, C. M. (2003). Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II. *21 Berkeley J. Int'l Law*. 375 .
- AWF.or.jp. (2000). "Who were the Comfort Women?-The Establishment of Comfort Stations". Dipetik Maret 22 Oktober 5, 2018, dari Digital Museum The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund.: <http://awf.or.jp/e1/facts-00.html>
- AWF.or.jp. (t.thn.). *Projects by country or region-South Korea*. Dipetik April 52018, dari The Asian's Women Funds: <http://awf.or.jp/e3/korea.html>
- BBC.com. (2015, Desember 28). *Japan and South Korea agree WW2 'comfort women' deal*. Dipetik April 6, 2018, dari BBC News: <http://www.bbc.com/news/world>
- Choe, S. (2015, Desember 28). *Japan and South Korea Settle Dispute Over Wartime 'Comfort Women'*. Dipetik Mei 5, 2019, dari The New York Times: <https://www.nytimes.com/2015/12/29/world/asia/comfort>
- Clinton, H. (2011). America's Pacific Century. *Foreign Policy*, 189, 56-53.
- CTBTO.org. (2015, Februari 12). *On the CTBTO's detection in North Korea*. Dipetik Mei 27, 2020, dari Comprehensive Nuclear
- Hudson, V. M. (2014). *Foreign Policy Analysis : Classic and Contemporary Theory* (2nd Edition ed.). Maryland: Rowman & Littlefield.
- Kennan, G. F. (2012). *American Diplomacy: Sixtieth-anniversary expanded edition*. University of Chicago Press.
- Kim, M. (2016, Januari 7). *The US the big winner in 'comfort women' agreement*. Dipetik November 13, 2019, dari East Asia Forum: <https://www.eastasiaforum.org/2016/01/07/the-us-is-the-big-winner-in-comfort-women-agreement/>
- Kim, O. H. (2014, Juni 9). *Washington and Beijing's Conflict Growing over Missile Defense*. Dipetik Agustus 5, 2020, dari The Hankyoreh: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_international/
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2013). *Pengadilan Kejahatan Perang Internasional Terhadap Perempuan: Keputusan 4 Desember 2001*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Lee, E. Y. (2015). The Role of the United States in the Comfort Women Controversy between South Korea and Japan. *Doctoral dissertation* .
- Lee, Y. S. (2016, November 24). *Seoul, Tokyo Sign Intelligence-Sharing Pact*. Dipetik Agustus 11, 2020, dari Chosun Ilbo: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2016/11/24/2016112400829.html?related_all
- Levy, B. S., & Sidel, V. W. (2000). *War and Public Health*. American Public Health Association.
- Lim, C.-W. (2015, Agustus 10). *S. Korea to resume propaganda war with North after mine blasts*. Dipetik Mei 30, 2020, dari The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2015/08/10/s-korea-resume-propaganda-war-with-north-after-mine-blasts.html>
- Manyin, M. E.-A. (2017). *US-South Korea Relations*. Washington, DC: Congressional Research Service.

- Marcus, J. (2010, November 23). *North Korean Artillery Hits South Korean Island*. Dipetik Juni 1, 2020, dari BBC News: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11818005>
- Mas'ud, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Mearsheimer, J. J. (2014). *The tragedy of great power politics (updated edition)*. New York, London: WW Norton & Company.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, Desember 28). *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. Dipetik Mei 3, 2020, dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (t.thn.). *Japan-U.S. Security Treaty*. Dipetik April 27, 2020, dari Ministry of Foreign Affairs of Japan: <https://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html>
- Moon, C.-I., & Boo, S.-C. (2015). Korean Foreign Policy: Park Geun-hye. *Japanese and Korean Politics*, 221-248
- Nam, H. W. (2016, Agustus 28). *Korea, Japan agree on talks to resume currency swap*. Dipetik Agustus 11, 2020, dari Korea Times: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2016/08/488_212892.html
- Rinehart, I. E., & Elias, B. (2015). *China's Air Defense Identification Zone (ADIZ)*. Congressional Research Service.
- Snyder, S. A. (2016, September 23). *Japan-South Korea Relations in 2016: A Return to the Old Normal*. Dipetik Februari 10, 2020, dari CFR.org: <https://www.cfr.org/blog/japan-south-korea-relations-2016-return-old-normal>
- Snyder, S., & Byun, S. W. (2011). Cheonan and Yeonpyeong: The Northeast Asian Response to North Korea's Provocations. *The RUSI Journal*, 156 (2), 74-81.
- Soh, C. S. (2001, Mei). Japan's Responsibility Toward Comfort Women Survivors. *JPRI Working Paper* (77).
- Tanaka, Y. (2002). *Japan's Comfort Women Sexual slavery and prostitution during World War II and the US occupation*. New York: Routledge.
- The Chosun Ilbo. (2015, Maret 17). *Seoul Must Stand Up to Chinese Pressure over THAA D*. Dipetik Agustus 5, 2020, dari The Chosun Ilbo: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2015/03/17/2015031701802.html.
- The Government of Japan. (2015, Desember 28). *Japan-ROK summit telephone call*. Dipetik Mei 3, 2020, dari The Government of Japan: <https://www.japan.go.jp/issues/comfortwomanissue.html>
- The Japan Times. (2011, Desember 15). *Statue of 'comfort woman' erected outside Japanese Embassy in Seoul*. Retrieved Juli 7, 2020, from The Japan Times: https://www.japantimes.co.jp/news/2011/12/15/national/statue-of-comfort-woman-erected-outside-japanese-embassy-in-seoul/#.XwRnfhJW_IU
- United Nation Commission On Human Rights. (1996). *Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime*. United Nation Economic and Social Council.
- United States Office of the Secretary of Defense. (2015). *Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2015*. Washington D.C.: United States Office of the Secretary of Defense.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politic*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc
- White House Office of the Press Secretary. (2014, April 25). *Press Conference with President Obama and President*. Dipetik Juni 27, 2020, dari White House Office of the

Press Secretary: <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/04/25/press-conference-president-obama-and-president-park-republic-korea>.
White House.org. (2013, Mei 7). *Remarks by President Obama and President Park of South*

Korea in a. Dipetik Mei 23, 2020, dari whitehouse.gov: www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/05/07/remarks-president-obama-and-president-park-south-korea-joint-press-conf